

# **INKLUSIVISME DAN TOLERANSI: KAJIAN TENTANG PLURALISME AGAMA DI INDONESIA**

**Dr. Bernard Bistok Lubis, M.Th,Elfa Rut Sari Situmorang; Enjelika Putri Silalahi;  
Theophilus Rames Ginting; Daniel Parlindungan Simbolon**

*Institut Agama Kristen Negeri Tarutung*

*Email: sarisitumorang50@gmail.com | enjelikaputrisilalahi@gmail.com*

*ramosginting2006@gmail.com | ddanielpsimbolon@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep inklusivisme dan toleransi dalam kerangka pluralisme agama di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman agama yang luar biasa, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk membangun masyarakat yang harmonis berbasis nilai-nilai toleransi dan inklusivisme. Melalui metode studi pustaka yang sistematis, penelitian ini menganalisis landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dari inklusivisme agama, serta relevansinya dalam konteks kehidupan plural di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa inklusivisme agama bukan sekadar sikap menerima perbedaan, melainkan suatu komitmen aktif untuk menemukan titik temu kemanusiaan universal di balik keberagaman ekspresi keagamaan. Toleransi yang sejati melampaui sekadar toleransi pasif dan berkembang menjadi apresiasi aktif terhadap kekayaan spiritual yang terdapat dalam berbagai tradisi agama. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi bagi pengembangan pendidikan agama yang inklusif, kebijakan kerukunan umat beragama, dan penguatan peran lembaga pendidikan tinggi keagamaan dalam membangun masyarakat Indonesia yang pluralis dan damai.

***Kata Kunci: Inklusivisme, Toleransi, Pluralisme Agama, Indonesia, Dialog Antaragama***

## **ABSTRACT**

This study examines the concepts of inclusivism and tolerance within the framework of religious pluralism in Indonesia. As a nation with extraordinary religious diversity, Indonesia faces challenges as well as opportunities to build a harmonious society based on the values of tolerance and inclusivism. Through a systematic literature study method, this research analyzes the theological, philosophical, and sociological foundations of religious inclusivism, and its relevance in the context of plural life in Indonesia. The study results show that religious inclusivism is not merely an attitude of accepting differences, but an active commitment to finding universal humanistic common ground beneath the diversity of religious expressions. True tolerance transcends mere passive tolerance and develops into active appreciation of the spiritual richness found in various religious traditions. The practical implications of this study include recommendations for developing inclusive religious education, policies on religious harmony, and strengthening the role of religious higher education institutions in building a pluralistic and peaceful Indonesian society.

***Keywords: Inclusivism, Tolerance, Religious Pluralism, Indonesia, Interfaith Dialogue***

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman agama tertinggi di dunia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang memeluk setidaknya enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Indonesia merupakan laboratorium hidup bagi praktik toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit merayakan keberagaman sebagai kekuatan persatuan bangsa.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa keberagaman ini tidak selalu dikelola dengan baik. Berbagai peristiwa konflik berbasis agama, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, dan meningkatnya sentimen intoleransi dalam beberapa dekade terakhir mencerminkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan di bawah permukaan kehidupan plural Indonesia. Di sinilah relevansi kajian tentang inklusivisme dan toleransi dalam bingkai pluralisme agama menjadi sangat mendesak.

Inklusivisme sebagai salah satu posisi teologis dalam triad tipologi John Hick, di samping eksklusivisme dan pluralisme, menawarkan jalan tengah yang menarik. Inklusivisme mengakui bahwa kebenaran dan keselamatan sejati terdapat dalam agama sendiri, namun secara bersamaan membuka diri terhadap kemungkinan adanya unsur-unsur kebenaran dan keselamatan dalam agama-agama lain. Posisi ini memungkinkan seorang pemeluk agama untuk mempertahankan komitmen iman yang otentik sekaligus menjalin hubungan yang bermakna dengan pemeluk agama lain.

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam hubungan antara inklusivisme sebagai posisi teologis dan toleransi sebagai sikap sosial dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana inklusivisme teologis dapat menjadi landasan filosofis bagi terwujudnya toleransi yang autentik dan berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang plural?

Kajian ini penting tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi praktis dan pastoral, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan seperti Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang bertugas mempersiapkan pemimpin-pemimpin agama yang mampu berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai dan harmonis di tengah keberagamannya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

## **A. Tipologi Sikap Teologis terhadap Agama Lain**

Dalam wacana teologi agama-agama (theology of religions), para teolog telah mengembangkan berbagai tipologi untuk menggambarkan sikap teologis satu agama terhadap agama-agama lain. Tipologi yang paling berpengaruh adalah model triadik yang dikembangkan oleh Alan Race (1983) dan kemudian dipopulerkan oleh John Hick (1989), yang membagi sikap tersebut menjadi tiga kategori: eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme.

Eksklusivisme adalah posisi teologis yang menegaskan bahwa keselamatan dan kebenaran sejati hanya terdapat dalam satu agama tertentu, dan bahwa agama-agama lain pada dasarnya salah atau tidak memadai. Pandangan ini paling sering dikaitkan dengan tafsiran tertentu atas doktrin *extra ecclesiam nulla salus* dalam tradisi Kristen, atau pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang diridhoi Allah dalam tradisi Islam.

Inklusivisme, sebaliknya, mengakui bahwa kebenaran dan keselamatan dapat ditemukan dalam agama-agama lain, meskipun kepenuhan kebenaran dan keselamatan tersebut hanya ada dalam agama sendiri. Karl Rahner, seorang teolog Katolik abad ke-20, mengembangkan konsep *anonymous Christians* untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus secara eksplisit tetap dapat diselamatkan melalui anugerah Kristus yang bekerja secara tersembunyi dalam kehidupan mereka.

Pluralisme adalah posisi yang paling inklusif, yang menegaskan bahwa semua agama pada dasarnya merupakan jalan yang sama-sama sah menuju kebenaran atau keselamatan tertinggi, meskipun melalui jalur yang berbeda-beda. Hick menggunakan analogi Copernican revolution dalam astronomi untuk menggambarkan pergeseran dari *theosentrisme* berbasis agama tertentu menuju suatu Realitas atau Yang Mutlak yang melampaui semua ekspresi agama.

## **B. Konsep Toleransi dalam Perspektif Lintas Disiplin**

Toleransi secara etimologis berasal dari kata Latin *tolerare* yang berarti menanggung atau membiarkan. Dalam perkembangan konseptualnya, toleransi telah mengalami elaborasi yang sangat kaya, dari sekadar toleransi negatif (tidak mengintervensi praktik agama lain) hingga toleransi positif (secara aktif menghargai dan merayakan perbedaan). Locke (1689) dalam karyanya *A Letter Concerning Toleration* meletakkan dasar filosofis bagi toleransi religius dalam konteks negara modern, dengan

argumen bahwa negara tidak berhak memaksakan kepercayaan agama tertentu kepada warganya.

Dalam konteks Indonesia, konsep toleransi telah diinstitusionalisasikan melalui Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar kehidupan berbangsa tanpa menetapkan agama negara secara spesifik. Formulasi ini mencerminkan suatu kompromi yang genius antara aspirasi negara Islam di satu sisi dan aspirasi negara sekuler di sisi lain, yang menghasilkan suatu model unik negara pluralis berbasis Ketuhanan.

Walzer (1997) membedakan antara lima rezim toleransi: (1) koeksistensi damai di antara komunitas-komunitas yang bermusuhan; (2) pasifisme fatalistik; (3) ketidakpedulian terhadap perbedaan; (4) rasa ingin tahu dan respek terhadap perbedaan; dan (5) dukungan antusias terhadap perbedaan sebagai kekayaan bersama. Kajian ini berargumen bahwa Indonesia membutuhkan pergeseran dari toleransi level pertama hingga ketiga menuju toleransi level keempat dan kelima agar kehidupan plural dapat benar-benar berkembang.

### **C. Pluralisme Agama dalam Konteks Indonesia**

Pluralisme agama di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat begitu saja dianalisis dengan kerangka teoritis yang dikembangkan di konteks Barat. Azyumardi Azra (2006) mengidentifikasi bahwa Islam di Indonesia secara historis telah berkembang dalam dialog yang dinamis dengan tradisi-tradisi lokal Hindu-Buddha dan animisme, sehingga melahirkan ekspresi Islam yang secara inheren lebih inklusif dan toleran dibandingkan banyak tradisi Islam di Timur Tengah.

Simanjuntak (2009) dalam kajiannya tentang pluralisme di Batak menemukan bahwa masyarakat Batak, yang secara mayoritas memeluk agama Kristen dengan sebagian Muslim, secara tradisional telah mengembangkan mekanisme-mekanisme sosial untuk menjaga kerukunan antaragama, yang bersumber dari nilai-nilai adat seperti Dalihan Na Tolu. Ini menunjukkan bahwa sumber daya budaya lokal dapat menjadi landasan yang kuat bagi toleransi dan inklusivisme.

Menurut Magnis-Suseno (2006), pluralisme agama di Indonesia bukan hanya fenomena sosiologis, melainkan juga merupakan amanah konstitusional. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan

konstitusional ini menjadi fondasi hukum bagi pembangunan masyarakat yang toleran dan inklusif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Studi pustaka dipilih sebagai metode penelitian karena kajian ini bersifat konseptual-teoritis yang bertujuan untuk memetakan, menganalisis, dan mensintesis pemikiran-pemikiran yang berkembang di sekitar isu inklusivisme, toleransi, dan pluralisme agama di Indonesia.

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian diperoleh dari dua kategori sumber. Sumber primer mencakup karya-karya monumental di bidang teologi agama-agama dan pluralisme agama, seperti karya John Hick, Karl Rahner, Raimundo Panikkar, dan para teolog Indonesia. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga-lembaga keagamaan yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Google Scholar, JSTOR, ProQuest, serta perpustakaan digital nasional.

#### **B. Teknik Analisis**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis kritis (critical analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola pemikiran yang muncul dalam literatur yang dikaji. Analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen-argumen yang dikemukakan, serta mengidentifikasi implikasi-implikasi praktis dari berbagai posisi teoritis yang dibahas. Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam suatu kerangka analitik yang koheren.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Inklusivisme sebagai Jalan Tengah Teologis**

Kajian literatur menunjukkan bahwa inklusivisme menawarkan posisi teologis yang paling realistis dan konstruktif bagi konteks Indonesia. Di satu sisi, inklusivisme tidak mengorbankan integritas iman pemeluk agama seperti yang dikhawatirkan terjadi dalam pluralisme radikal. Di sisi lain, inklusivisme membuka pintu bagi dialog yang

bermakna dan koeksistensi yang harmonis, yang tidak dimungkinkan oleh eksklusivisme yang kaku.

Dalam konteks teologi Kristen, perkembangan inklusivisme dapat dilacak dari Konsili Vatikan II (1962–1965) yang dalam dokumen *Nostra Aetate* secara eksplisit menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Pernyataan ini menandai pergeseran paradigmatis yang signifikan dari eksklusivisme yang mendominasi teologi Kristen sebelumnya menuju suatu keterbukaan yang lebih inklusif.

Raimundo Panikkar, seorang teolog yang memiliki latar belakang Kristen-Hindu, mengembangkan konsep *intrareligious dialogue*, yakni dialog yang tidak hanya terjadi antara dua tradisi agama, tetapi juga terjadi di dalam batin seorang pemeluk agama yang secara tulus membuka diri terhadap pengalaman spiritual tradisi lain. Pendekatan Panikkar ini sangat relevan bagi konteks Indonesia, di mana banyak individu dan komunitas secara organis hidup dalam persimpangan berbagai tradisi agama dan budaya.

Dari perspektif Islam, konsep inklusivisme dapat ditemukan dalam gagasan-gagasan ulama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang mengembangkan teologi inklusif berbasis nilai-nilai universal Islam. Cak Nur dengan famous dictum-nya *Islam yes, partai Islam no* dan *secularization (but not secularism)* berusaha memisahkan komitmen iman yang otentik dari politisasi agama yang eksklusif dan intoleran.

## **B. Dinamika Toleransi Beragama di Indonesia: Antara Ideal dan Realitas**

Hasil kajian menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara cita-cita toleransi yang termaktub dalam Pancasila dan konstitusi dengan realitas praktik keagamaan di lapangan. Setara Institute dalam laporan tahunannya (2021) mencatat masih tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, mulai dari pelarangan pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, hingga berbagai bentuk ujaran kebencian berbasis agama.

Paradoks ini mengindikasikan bahwa persoalan intoleransi di Indonesia bukan sekadar persoalan hukum atau kebijakan, melainkan lebih mendasar: persoalan pembentukan karakter dan mentalitas warga. Tanpa transformasi pada level keyakinan dan sikap fundamental warga terhadap pemeluk agama lain, perubahan hukum dan

kebijakan hanya akan menghasilkan toleransi semu yang rentan runtuh ketika menghadapi tekanan sosial dan politik.

Penelitian Crouch (2010) tentang regulasi keagamaan di Indonesia menemukan bahwa negara memainkan peran ambivalen dalam isu toleransi beragama: di satu sisi berkomitmen pada perlindungan kebebasan beragama, di sisi lain justru menjadi aktor yang mengintervensi dan merestriksi ekspresi keagamaan tertentu melalui regulasi seperti SKB Dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Ambivalensi ini mencerminkan ketegangan yang belum terselesaikan antara aspirasi pluralisme dan tekanan konservatisme agama di tingkat kebijakan.

### **C. Dialog Antaragama sebagai Praktik Inklusivisme**

Dialog antaragama merupakan wujud praktis dari inklusivisme teologis. Knitter (2002) mengidentifikasi empat model dialog antaragama: (1) model replacement, di mana salah satu tradisi berusaha menggantikan tradisi lain; (2) model fulfillment, di mana satu tradisi dipandang sebagai pemenuhan dari tradisi lain; (3) model mutuality, di mana semua tradisi dipandang setara dan saling melengkapi; dan (4) model acceptance, di mana perbedaan diterima sebagai permanen dan tidak perlu diselesaikan. Dalam konteks Indonesia, model mutuality dan acceptance tampaknya paling sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Berbagai forum dialog antaragama telah berkembang di Indonesia, dari yang dilembagakan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap kabupaten/kota, hingga yang lebih informal seperti komunitas-komunitas dialog grassroots yang bermunculan di berbagai kota. Wahid Foundation (2019) mendokumentasikan ratusan inisiatif dialog antaragama yang dijalankan oleh masyarakat sipil di seluruh Indonesia, mencerminkan besarnya energi sosial yang tersedia untuk membangun toleransi dari bawah.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh dialog antaragama di Indonesia juga tidak kecil. Selain tantangan struktural berupa keterbatasan dana dan sumber daya manusia, terdapat juga tantangan epistemologis berupa kecurigaan dari kelompok-kelompok keagamaan konservatif yang memandang dialog antaragama sebagai upaya sinkretisme atau pengkerdilan identitas agama. Tantangan ini harus direspons dengan komunikasi yang jelas tentang tujuan dan batas-batas dialog antaragama yang tidak bertujuan mencampurkan keyakinan agama.

#### **D. Implikasi bagi Pendidikan Agama di Indonesia**

Kajian ini menemukan bahwa pendidikan agama memiliki peran sentral dalam menanamkan sikap inklusif dan toleran. Muhaimin (2012) mengkritisi kecenderungan pendidikan agama di Indonesia yang masih bersifat eksklusif dan doktriner, yang lebih berfokus pada penguasaan ritual dan doktrin agama sendiri tanpa memberikan pemahaman yang memadai tentang agama-agama lain dan nilai-nilai pluralisme.

Model pendidikan agama yang inklusif dan pluralis harus mampu mencapai keseimbangan yang halus antara dua kutub yang saling tarik: di satu sisi memperkuat identitas dan komitmen iman peserta didik terhadap agamanya sendiri, di sisi lain membangun keterbukaan dan apresiasi terhadap tradisi agama lain. Pendidikan agama yang berhasil bukanlah yang menghasilkan pemeluk agama yang lemah imannya namun toleran, melainkan yang menghasilkan pemeluk agama yang kuat imannya sekaligus terbuka dan respectful terhadap keyakinan orang lain.

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan dapat menjadi model bagi pengembangan pendidikan agama yang inklusif. Dengan merancang kurikulum yang mengintegrasikan mata kuliah-mata kuliah seperti Perbandingan Agama, Dialog Antaragama, dan Etika Global, IAKN Tarutung dapat mempersiapkan sarjana-sarjana teologi yang tidak hanya mendalam dalam iman Kristen mereka, tetapi juga memiliki wawasan lintas agama yang luas dan kemampuan berdialog secara konstruktif dengan pemeluk agama lain.

#### **V. KESIMPULAN**

Kajian ini telah menunjukkan bahwa inklusivisme dan toleransi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dan saling menopang dalam kerangka pluralisme agama di Indonesia. Inklusivisme sebagai posisi teologis menyediakan landasan reflektif yang memungkinkan seorang pemeluk agama untuk secara bersamaan mempertahankan komitmen iman yang autentik dan membuka diri terhadap kebenaran dan nilai yang terdapat dalam tradisi agama lain. Landasan teologis ini pada gilirannya menopang terwujudnya toleransi yang sejati, bukan sekadar toleransi taktis demi kepentingan pragmatis.

Realitas pluralisme agama di Indonesia menghadirkan konteks yang unik bagi pengembangan inklusivisme dan toleransi. Di satu sisi, kekayaan tradisi keagamaan yang beragam dan warisan budaya toleransi yang mengakar dalam berbagai komunitas lokal



merupakan modal sosial yang sangat berharga. Di sisi lain, berbagai tantangan seperti polarisasi berbasis identitas agama, intervensi negara yang ambivalen, dan keterbatasan program pendidikan agama yang inklusif memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.

Dialog antaragama yang bermakna, bukan sekadar seremonial, merupakan arena praktis di mana inklusivisme teologis dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Berbagai model dan forum dialog antaragama yang berkembang di Indonesia mencerminkan vitalitas masyarakat sipil dalam merawat kerukunan dari bawah, yang perlu terus didukung dan dikembangkan.

Implikasi terpenting dari kajian ini adalah perlunya transformasi pendidikan agama di semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, menuju model yang lebih inklusif, pluralis, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang demokratis dan toleran. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan seperti IAKN Tarutung memiliki peran strategis dan tanggung jawab moral yang besar dalam proses transformasi ini.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian-kajian empiris lanjutan dilakukan untuk menguji secara konkret dampak program-program pendidikan berbasis inklusivisme dan toleransi terhadap perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang berfokus pada komunitas-komunitas spesifik akan memperkaya pemahaman kita tentang dinamika inklusivisme dan toleransi dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan.
- Crouch, M. (2010). Implementing the Regulation on Religious Affairs: A Case Study of Congregational Permits in Yogyakarta. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44(2), 53–87.
- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. New Haven: Yale University Press.
- Knitter, P. F. (2002). *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll: Orbis Books.
- Locke, J. (1689/1983). *A Letter Concerning Toleration*. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Magnis-Suseno, F. (2006). *Beragama dalam Alam Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin, A. (2012). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Panikkar, R. (1978). *The Intrareligious Dialogue*. New York: Paulist Press.
- Race, A. (1983). *Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions*. London: SCM Press.
- Rahner, K. (1966). *Theological Investigations*, Vol. 5. Baltimore: Helicon Press.
- Setara Institute. (2021). *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- Simanjuntak, B. A. (2009). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wahid Foundation. (2019). *Peta Toleransi di Indonesia: Survei Nasional*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Walzer, M. (1997). *On Toleration*. New Haven: Yale University Press.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.